

**PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)**

Oleh:

Fakhri Haikal Amanullah¹

M. Nur Halim²

Burhanul Haqiqi Alfarizi³

Ida Wahyuliana⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: erizz8599@gmail.com

***Abstract.** Bakesbangpol is an institution tasked with and also responsible for carrying out and coordinating activities related to national unity, politics and also community empowerment in the country of Indonesia. This institution is very responsible for ensuring that the policies made are based on the principles of diversity, justice and community participation in the administration of regional government in the fields of national unity and politics. The various components related to local policy, including development strategies, finances and work programs, during the process of preparing and implementing local policies must be considered properly, carefully and thoroughly. As explained in paragraph (1) of the written regulation, Republic of Indonesia Government Regulation number 8 of 2008 concerning several stages, procedures for preparing, controlling and evaluating the implementation of regional development plans defines planning as a process for determining future actions. the most appropriate, through the order of choice, with an accounting of existing resources in Indonesia.*

***Keywords:** Bakesbangpol Bangkalan, Local government, Work plan.*

**PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)**

Abstrak. Bakesbangpol adalah sebuah lembaga yang bertugas dan juga bertanggung jawab untuk melakukan dan mengoordinasikan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan sebuah bangsa, politik, dan juga pemberdayaan masyarakat di negara Indonesia ini. Lembaga ini sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sudah didasarkan pada prinsip yaitu keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan juga politik. Berbagai komponen-komponen yang terkait dengan kebijakan lokal ini juga termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lokal harus diperhatikan dengan baik, cermat dan juga seksama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat (1) dari peraturan tertulis tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang beberapa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan sebuah tindakan masa depan yang paling tepat, melalui urutan pilihan, dengan akuntansi sumber daya yang ada di negara Indonesia ini.

Kata Kunci: Bakesbangpol Bangkalan, Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja.

LATAR BELAKANG

Bakesbangpol adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik, pemberdayaan masyarakat, dan kesatuan bangsa. Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip keberagaman, keadilan, dan partisipasi masyarakat saat memberikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selama proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di suatu daerah, berbagai elemen yang terkait dengan kebijakan daerah, termasuk strategi pembangunan, keuangan, dan program kerja harus diperhatikan dengan cermat. Dalam hal dukungan kepada Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini sangat penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan daerah. Selain pembentukan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, pembentukan organisasi kemasyarakatan, menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa di

wilayah Kabupaten Bangkalan. Di lain hal penyusunan kebijakan dalam bakesbangpol di tuangkan dalam Rencana Kerja untuk ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, seperti halnya dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2019. Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk mengetahui Perubahan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.¹ Selain itu, sangat penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal kesatuan bangsa dan politik. Ini penting untuk melaksanakan pembantuan kebijakan dalam pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keutuhan NKRI, serta untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten bangkalan. Oleh karena itu, usulan tersebut disebut sebagai “Praktek Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan.”

Praktik Kerja Lapangan ini memiliki manfaat untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam upaya mencapai kualifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana tertuang dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum. Proses pembelajaran menggunakan student learning centre (SCL) dengan tujuan agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pekerjaan, disiplin, jujur, dan dapat bekerjasama dalam tim. Metode pembelajaran merupakan gabungan dari diskusi, simulasi, pembelajaran berbasis proyek/projek based learning (PjBL). Pembelajaran berbasis masalah/problem based learning (PbBL). Pengukuran kompetensi dilakukan oleh pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing pada program studi dengan menggunakan portofolio. Teknik penilaian menggunakan observasi, partisipasi, untuk kerja dan tes lisan yang digunakan menyesuaikan dengan kompetensi yang di ukur. Tujuan lain dari pembuatan karya ilmiah ini dengan cara Praktik Kerja Lapangan yakni untuk kepentingan akademis dan

¹ Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2019.

**PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)**

juga untuk kepentingan Praktik Kerja Lapangan di kantor Bakesbangpol. Maka dari itu mahasiswa diharapkan mengetahui secara jelas dan benar tentang praktek pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik oleh bakesbangpol kabupaten bangkalan.

METODE PENELITIAN

Penulis artikel ini melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan gambaran yang adil terhadap setiap orang, penulis penelitian deskriptif harus melihat latar belakang masyarakat. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Observasi sebagai metode pengumpulan data yang memiliki karakteristik tertentu. Jika penelitian mencakup perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam, dan responden tidak terlalu besar, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan. Pada tahap ini, peneliti perlu mengetahui kondisi responden sebelum penelitian dilakukan. Mereka juga perlu mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang nantinya akan membantu penelitian berhasil. Seseorang dapat melakukan wawancara dengan terstruktur atau tidak terstruktur. Peneliti membuat keputusan untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari narasumber. Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang artinya "benda tertulis". Untuk menggunakan teknik dokumentasi, Anda harus melihat dokumen, buku, majalah, peraturan, catatan harian, notulen rapat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap untuk penggunaan metode observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 menetapkan tugas pokok, fungsi, dan uraian perangkat daerah, khususnya Kesbangpol. Kesbangpol berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah berdasarkan sebagai desentralisasi

dan melakukan tugas pembantuan dalam bidang kesatuan dan politik dalam negeri. Peraturan-peraturan-undangan mengenai tugas Kesbangpol yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa Kesbangpol adalah lembaga negara dengan tugas sosialisasi politik yang sangat penting. Guna menyempurnakan pengimplementasian ideologi Pancasila sebagai landasan negara serta wawasan kenegaraan masyarakatnya, Kesbangpol bertugas membudayakan pemahaman serta pandangan politik khalayak banyak, fungsi dari Kesbangpol ini memperlihatkan bahwasannya pemerintah tidak menganggap remeh dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang pendidikan politik kewarganegaraan. Dilihat melalui sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia, benih-benih perjuangan dan pergerakan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, berawal dari sosialisasi politik yang terjadi di ranah sosial Masyarakat.² Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Bakesbangpol berfokus pada peningkatan kapasitas pengetahuan politik masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Tugasnya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Prosedur Penyusunan Kebijakan Dalam Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan

Prosedur yang jelas dan terorganisir diperlukan untuk mewujudkan dan menerapkan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berhasil . Dalam

² Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahya, 2017), h. 60- 63.

PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)

hal Kabupaten Bangkalan, Bakesbangpol memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan daerah, strategi, program, dan kegiatan institusi ini fokus pada kesatuan bangsa dan politik. Pada akhirnya, hal-hal yang mendasari program rencana kerja prioritas Kesbangpol termasuk ketahanan bangsa, pembauran kebangsaan, kerukunan umat beragama, pendidikan politik, penanganan konflik, pemberdayaan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, serta kewaspadaan dini masyarakat.³ Rencana Tahun Pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (juga dikenal sebagai Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku selama satu tahun. Renja OPD adalah rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai strategi untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (OPD), dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi, misi, dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai dengan Arah Operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan acuan untuk penyusunan kebijakan, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dicakup dan sesuai dengan keperluan khalayak umum untuk manfaatnya, yang selanjutnya Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran (RKA). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 1 (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwasanya Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

³ Pemkotdepok, —Kesbangpol Bahas Tujuh Program Prioritas, diakses melalui <https://www.depok.go.id>, pada 22 November 2024

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.⁴ Oleh karena itu, kebijakan Bakesbangpol harus dibuat secara jelas, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan dan potensi kabupaten bangkalan.

Pelaksanaan Kebijakan Dalam Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatur dalam Dokumen Implementasi Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), yang merupakan dokumen yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendaftarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, serta alokasi anggaran yang dipilih untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis dan operasi. Pelaksanaan kebijakan yang telah di buat haruslah mengacu kepada Indikator Kinerja Program (*outcome*) Kegiatan (*output*) dengan menggunakan indikator capaian program dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018–2023. Dengan target memenuhi Renstra Perangkat Daerah, yang didasarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaannya, menunjukkan kinerja program yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja-OPD) badan kesatuan nasional dan politik kabupaten bangkalan. Jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan program yang telah disusun sebelumnya dalam rencana kerja organisasi perangkat daerah, maka hal itu akan terjadi.

Praktik Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan

Bakesbangpol sebagai lembaga yang bertugas menjaga kesatuan bangsa dan politik memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Bakesbangpol berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta bertanggung jawab langsung kepada bupati, mempunyai peran

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

**PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)**

yang penting dalam suatu daerah sebagai lembaga yang bertugas menjaga kesatuan bangsa dan politik. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada suatu daerah memanglah sangat di perlukan keberadaannya untuk masyarakat guna untuk menjalankan program program tentang kebangsaan bernegara dan juga pemahaman politik terhadap masyarakat. Adapun beberapa aspek program rencana kerja prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu di antaranya, ketahanan bangsa, pembauran kebangsaan, kerukunan umat beragama, pendidikan politik, penanganan konflik, pemberdayaan ormas dan LSM, serta kewaspadaan dini masyarakat. Meskipun demikian program kerja yang akan dilaksanakan haruslah telah di setujui oleh bupati selaku pemimpin pada daerah tersebut sehingga dalam pelaksanaan program kerja tersebut dalam dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Dalam hal ini badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bangkalan untuk pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam implementasinya rancangan kerja yang telah final dalam RENJA tahunan, badan kesatuan bangsa dan politik telah melaksanakan programnya dengan baik. Meskipun dalam hal ini banyak kolaborasi dengan instansi terkait karena keterbatasan anggaran yang di berikan. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pentingnya dukungan Bakesbangpol dalam pembangunan daerah.

1. Penguatan Kebangsaan

Bakesbangpol memiliki tugas utama untuk memperkuat kesatuan bangsa melalui berbagai program dan kegiatan. Dengan mengadakan sosialisasi, seminar kebangsaan, dan peringatan hari-hari bersejarah, Bakesbangpol dapat meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas nasional tetapi juga menciptakan rasa persatuan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Pencegahan Konflik Sosial

Salah satu peran penting Bakesbangpol adalah mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dengan mengadakan dialog dan sarasehan, Bakesbangpol dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah tersebut berkembang. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat

dalam forum-forum ini membantu menciptakan suasana yang harmonis, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.

3. Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Salah satu peran penting Bakesbangpol adalah mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dengan mengadakan dialog dan sarasehan, Bakesbangpol dapat mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah preventif sebelum masalah tersebut berkembang. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam forum-forum ini membantu menciptakan suasana yang harmonis, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Bakesbangpol mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui mekanisme konsultasi publik dan musyawarah. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program-program pembangunan, Bakesbangpol memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga akuntabilitas pemerintah daerah.⁵

KESIMPULAN

Hasilnya adalah bahwa Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan memberikan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah bagian dari perangkat pemerintah daerah dan ditugaskan untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan pelaksanaan kebijakan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terlepas dari Rencana Tahun Pembangunan Organisasi Perangkat. Sesuai dengan instruksi operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan juga bertanggung jawab untuk membangun dukungan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pembangunan daerah. Dalam upaya memperkuat kesatuan bangsa, mencegah konflik sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan

⁵ Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (2024). Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Percepatan Transformasi Digital. Jakarta
[<https://spbe.pontianak.go.id/storage/materi/May2024/utksuKi2ky Cw9M9QovgL.pdf>]

**PEMBERIAN DUKUNGAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL KABUPATEN BANGKALAN)**

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan kebijakan Bakesbangpol perlu dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki pada kabupaten bangkalan. Kebijakan Bakesbangpol harus disusun secara jelas, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan dan potensi kabupaten bangkalan. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan dan pencapaian target kinerja, Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan harus menerapkan Program Indikator Kinerja sesuai dengan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan. Untuk mewujudkan kondisi yang sesuai, Bakesbangpol Kabupaten Bangkalan membutuhkan dukungan. Bakesbangpol dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan lokal melalui penguatan kesatuan bangsa, pencegahan konflik, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pendidikan politik. Sinergi yang akan tercipta jika semua bagian masyarakat terlibat secara aktif dalam proses ini.

DAFTAR REFERENSI

- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (2024). Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Percepatan Transformasi Digital. Jakarta; [https://spbe.pontianak.go.id/storage/materi/May2024/utksuKi2kyCw9M9Qovg L. pdf]
- Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik, (Yogyakarta: Pohon Cahya, 2017).
- Pemkotdepok, —Kesbangpol Bahas Tujuh Program Prioritas, diakses melalui https://www.depok.go.id , pada 22 November 2024.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2019
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Prognatik. Jurnal ISLAMIC REVIEW, Volume 3, No. 1 , 117-145.

Vellayati , H., & Ikhsan. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMAN 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bakti Teuku Umar*. Vol 1, No 1, 19-27.